



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	: 28 (Duapuluh delapan)
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI)
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Pembahasan mengenai Indikator Penurunan Peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat; 2. Pembahasan mengenai Pengawasan Penjualan Obat-obatan secara <i>online</i> ; 3. Pembahasan mengenai Kesiapan Badan POM RI dalam menghadapi MEA; 4. Pembahasan mengenai Kesiapan Badan POM RI dalam menghadapi Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Ketua Rapat	: Dede Yusuf M.E.,S.T.,M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 25 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI; 5 orang anggota izin; B. Kepala Badan POM RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk mengawasi secara komprehensif penjualan obat dan makanan secara *online*.
2. Komisi IX DPR RI mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA) oleh BPOM dan mendorong BPOM RI untuk lebih memperluas jangkauan dari GN-POPA dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat ilegal dan substandard, dengan meningkatkan koordinasi dengan para penegak hukum.
4. Komisi IX DPR RI mendorong BPOM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk memanfaatkan kenaikan alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya, terutama anggaran untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota Komisi IX DPR RI.
6. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperkuat terbitnya aspek legal berupa peraturan daerah dan turunannya terkait Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria.
7. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk secara pro-aktif menginisiasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
8. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini, Senin 22 Februari 2016, paling lambat pada hari Senin 29 Februari 2016.

Rapat diakhiri pukul 13.40 WIB

**Ketua Rapat /
Ketua Komisi IX DPR RI,**



Dede Yusuf M.E., S.T., M.I. Pol
A-415

Kepala Badan POM RI,



Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc